

**PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI BIDANG KEUANGAN (STUDI
OPTIMALISASI PADES DI DESA HANGTUAH KECAMATAN
PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012-2014)**

Rudi Setiyawan
Email: Rudiawan15@yahoo.co.id

Auradian Marta, S.IP, MA

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277**

Abstrak

Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja belum terselenggara secara maksimal, hal ini dikarenakan adanya wewenang Pemerintah Desa untuk mengatur tugas fungsi struktur personalia dan anggaran yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi serta kemampuan desa dalam melayani masyarakat belum maksimal pula.

Penelitian ini dilakukan di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif dikarenakan pengambilan data dari informan dilakukan dengan wawancara mendalam dari informan-informan yang terkait. Sehingga rumusan masalah dalam hal ini adalah Bagaimanakah upaya Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar tahun 2012-2014 dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemerintah Desa dalam menggali potensi desa Di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2012-2014.

Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa upaya Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar adalah dengan lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Desa khususnya dalam pelaksanaan pembangunan maka perlu di tingkatkan lagi kemapuan aparat desa dalam hal manajemen, pendidikan, baik itu pelatihan bagi kader desa sehingga potensi yang belum dikelola dapat di manfaatkan demi kepentingan kesejahteraan desa. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Hangtuh adalah Faktor Sarana dan Prasarana, Sedikitnya aset desa yang menghasilkan pendapatan Desa, Rendahnya gaji/honor perangkat desa

Kata Kunci : Pelaksanaan, Otonomi Desa, Keuangan

**AUTONOMY VILLAGE IN THE FINANCIAL SECTOR (STUDY
OPTIMIZATION OF PADES IN THE VILLAGE OF PERHENTIAN RAJA
HANGTUAH DISTRICT OF KAMPAR REGENCY YEAR 2012-2014)**

Rudi Setiyawan

Email: Rudiawan15@yahoo.co.id

Auradian Marta, S.IP, MA

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277**

Abstrak

Implementation of Rural Village Government in the District Hangtuh Perhentian Raja has not been established to the maximum, this is because the village government authority to regulate duty personnel structure and budget functions required to move the organization and the ability to serve the community of the village have not been up anyway.

This research was conducted in the Hangtuh village of Perhentian Raja District of Kampar. The data used in this study is Primary data and secondary data. Data collection through in-depth interviews and documentation. This study uses qualitative descriptive method because the retrieval of data from informants depth interviews of informants related. So that the problem in this case is How the Village Government efforts in improving the District Revenue Hangtuh Village Perhentian Raja Kampar years 2012-2014 and What are the factors that affect the government's efforts in exploring the potential of rural village In the village of Perhentian Raja Hangtuh District of Kampar Regency in 2012 -2014.

From the results of this study are described that attempt Village Government in Increasing Revenue Village Hangtuh District of Perhentian Raja Kampar is to further strengthen the implementation of Village Autonomy in particular in the implementation of development it is necessary to increase again Traffic village officials in management, education, whether it is training for cadres village so untapped potential can be utilized for the sake of the welfare of the village. Factors Inhibiting Autonomy Village in the Village Hangtuh is a factor Infrastructures, at least revenue-generating asset village Village, Low salaries / honorarium village

Keywords: *Implementation, Village Autonomy, Finance*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa yang di tindaklanjuti dengan peraturan menteri dalam negeri No.30 tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten/ kota kepala desa pada prinsipnya mengatur jenis dan rincian urusan pemerintah kabupaten/kota yang serahkan kepada desa, tata cara penyerahan urusan pelaksanaan urusan pembiayaan serta pembinaan dan pengawasan.

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa di harapkan pemerintah kabupaten secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut :

1. Memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian konservasi pembangunan yang berkelanjutan.
2. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memfalisitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan lembaga-lembaga masyarakat serta komponen masyarakat desa lainnya melalui pembinaan dan pengawasan pemberian pedoman bimbingan pelatihan dan supervise.

Salah satu Kecamatan yang dijelaskan diatas adalah Kecamatan Perhentian Raja yang tengah

mengalami perkembangan wilayah yang cukup pesatnya, Pemerintah Kecamatan Perhentian Raja dalam hal ini dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai penanggung jawab dalam mensejahteraan perekonomian masyarakat maka pemerintah dituntut memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat salah satunya melalui pelaksanaan otonomi desa.

Kecamatan Perhentian Raja terdiri dari 5 Desa dengan luas wilayah 1.570 hektar dan jumlah penduduk 1.870 jiwa, adapun nama Desa yang terdapat di Kecamatan Perhentian Raja yakni :

Tabel 1.1
Jumlah Desa di Kecamatan Perhentian Raja

No	Nama Desa di Kecamatan Perhentian Raja
1	Desa Kampung Pinang
2	Desa Lubuk Sakat
3	Desa Pantai Raja (Perhentian Raja)
4	Desa Hangtuah
5	Desa Sialang Kubang

Sumber : Kantor Camat Perhentian Raja Tahun 2014

Masyarakat Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja merupakan komunitas homogen pinggir kota. Tetapi memiliki pandangan dan pemikiran dan tingkat pendidikan yang berbeda, sehingga rumit untuk menyamakan prepepsi begitu juga dalam hal otonomi desa. Namun belakangan ini masyarakat Desa Hangtuah mulai mengalami pergeseran dalam menyikapi otonomi desa yang belakangan ini di anggap tidak

penting dan mendasar. Hal ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang cenderung mengagungkan modernisasi di tengah globalisasi saat ini.

Desa Hangtuah merupakan Desa yang sebagian besar masyarakatnya berasal dari suku Jawa yang mendiami wilayah Desa Hangtuah. Dimana pendapatan masyarakat 90% di peroleh dari hasil perkebunan sawit yang dapat dijumpai di hampir wilayah Kecamatan Perhentian Raja.

Tujuan otonomi Desa di Desa Hangtuah ini diharapkan agar masyarakat bisa merasakan adanya pengelolaan desa lebih transparan, prosedur birokrasi yang gampang, pelaksanaan demokrasi lebih semarak dan dinamis, secara langsung akan membawa dampak partisipasi optimal dari masyarakat. Berdasarkan observasi penulis awal peneliti menemukan fenomena:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa yang di sebabkan ketidak pahaman perangkat desa mengenai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan otonomi desa sangat di pengaruhi oleh kinerja pemerintahan desa dalam hal ini pemerintahan desa di kecamatan Perhentian Raja khususnya di Desa Hangtuah belum berjalan secara optimal.
2. Bergesernya nilai-nilai dimasyarakat, yang diakibatkan modernisasi dan perubahan sosial yang

membuat masyarakat semakin meninggalkan adatistiadat yang dianggap sudah ketinggalan jaman. Hal inilah yang memicu sifat hedonis dan ketidak pedulian dimasyarakat yang dapat menghilangkan makna otonomi asli itu sendiri.

3. Minimnya sumber pembiayaan, pelaksanaan otonomi desa di Kecamatan Perhentian Raja juga terkendala pada minimnya sumber pendanaan yang dimiliki oleh desa. Terbatasnya kemampuan pendanaan tersebut antara lain di sebabkan karena pemerintah terkait belum menerapkan kebijakan mentransfer keuangan Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga desa tidak memiliki sumber pembiayaan pasti dalam membiayai berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa. Pemerintah desa masih sangat tergantung pada bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten, sementara untuk sumber pendapatan asli desanya seperti hasil usaha desa dan hasil kekayaan desa (tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa dan lain-lain) umumnya tidak memberikan hasil yang signifikan bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak jelasnya sumber pembiayaan yang dimiliki oleh desa juga berdampak

pada sulitnya desa dalam menyusun APBDesa.

4. Batasan kewenangan yang tidak jelas, pengaturan desa yang dituangkan dalam peraturan daerah (PERDA), cenderung hanya merujuk dan merespon peraturan perundang-undangan yang telah ada, sehingga terkesan abstrak dan sangat kabur karena tidak mencantumkan secara rinci kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa, permasalahan ini pula yang dihadapi oleh pemerintah desa Hangtuah, ditambah lagi keterbatasan SDM yang semakin menambah problematika.
5. Kuatnya intervensi pemerintah desa yang menyebabkan pemerintah desa yang menyebabkan pemerintah desa itu sendiri tidak leluasa dalam menjalankan roda pemerintahan.

Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar merupakan Desa yang sedang giat melaksanakan otonomi desa, sebagaimana telah terwujud peningkatannya Pendapatan Asli Desa (PADes) dari tahun ke tahun. Salah satu contohnya ialah hasil dari observasi penulis lakukan yakni pendapatan asli desa (PADes) Hangtuah dari tahun 2012 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan yang signifikan, yakni mengalami peningkatan kurang lebih 15% sampai 20% pertahunnya.

Adapun efek yang di timbulkan dari peningkatan pendapatan asli desa (PADes) ini ialah sangat terasa dan membantu

tentunya di dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Hangtuah. Berdasarkan paparan dari permasalahan diatas maka kajian pokok dalam penelitian ini adalah mengenai *“Pelaksanaan Otonomi Desa di Bidang Keuangan (Studi Optimalisasi PADes Di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2012-2014).*

METODE PENELITIAN

Penelitian di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2014. Karena peneliti tertarik untuk meneliti Pendapatan asli desa di karenakan mengalami peningkatan di tiap tahunnya, yang di tunjang juga semakin meningkatnya sumber pendapatan desanya. mulai terhitung di tiga tahun terakhirnya, yakni pada tahun 2012, 2013, 2014.

PEMBAHASAN

3.1. Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2014

a. Identifikasi dan Inventarisasi Nilai dan Potensi Kekayaan Desa

Upaya yang telah dilakukan Desa Hangtuah dalam proses identifikasi dan inventarisasi adalah dengan mengidentifikasi kekayaan desa yaitu dengan berpedoman pada buku panduan Letter C yang berisi lahan atau kekayaan yang dimiliki desa untuk merancang pembangunan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan musyawarah bersama yakni Musrenbang-Desa yang terdiri dari pemerintah desa,

tokoh masyarakat, dan BPD. Alur selanjutnya yaitu pembuatan peraturan desa, setelah peraturan desa sudah ditetapkan maka langkah selanjutnya yaitu proses pengajuan pembangunan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kampar (BAPEDDA). Sehingga potensi pendapatan asli desa yang dimiliki Desa Hangtuah dapat berkembang yang terdiri dari:

1. Tanah bengkok atau tanah kas desa
2. Tanah hibah
3. Koperasi desa
4. Iuran tempat penitipan kendaraan (parkir)
5. Kios perdagangan
6. Iuran petani kelapa sawit perkelompok tani
7. Iuran petani lele perkelompok
8. Iuran petani sapi perkelompok
9. Serta peralihan wewenang pengelolaan pasar desa
10. Dll

Kewenangan pemerintah Desa Hangtuah terkait perolehan hak pendapatan asli desa sesuai aturan yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 76 ayat 5 tentang kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota dikembalikan kepada desa. Dengan berpedoman dari Undang-undang tersebut maka pemerintah Desa Hangtuah telah mengambil alih hak pengelolaan pasar desa, yang sebelumnya telah dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar, sehingga pada 1 Januari 2010 pasar desa resmi berhak dikelola oleh desa telah resmi dikelola oleh pemerintah Desa Hangtuah

pada 1 Agustus 2011. Sedangkan tanah bengkok, tanah hibah, sewa penitipan kendaraan (parkir), kios perdagangan, koperasi desa, sejak awal sudah dikelola secara mandiri oleh pemerintah Desa Hangtuah.

Sehingga dengan adanya identifikasi terkait kekayaan pendapatan asli desa yang dimiliki maka, desa bisa mengelola dan mengembangkan pendapatan asli desanya secara maksimal. Dengan hasil pendapatan asli desa dapat pula pemerintah desa diharapkan mampu mengembangkan sarana prasarana untuk mendukung lajunya kebutuhan masyarakat terutama di bidang perdagangan.

b. Perlunya Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Desa

Sistem informasi manajemen Desa Hangtuah terkait pengelolaan pendapatan asli desa berupa database kekayaan yang dimiliki oleh desa, yang terdiri dari inventarisasi sumber pendapatan yang diperoleh dari pendapatan asli desa, perolehan hasil pengelolaan pendapatan asli desa tiap tahun, peningkatan pendapatan asli desa, struktur organisasi pengelola pendapatan asli desa.

Sistem informasi manajemen Desa Pandanarum lebih menekankan pada kelengkapan *database* meskipun hanya sekadar database secara manual sebagai laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah kabupaten. Sedangkan pertanggung jawaban dan transparansi kepada masyarakat belum terlaksana terkait pemerintah desa belum

menyediakan akses terbuka seperti salah satunya adalah website resmi Desa Hangtuah. Sehingga sistem informasi manajemen dalam pengelolaan pendapatan asli desa Hangtuah menjadi kurang maksimal dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

c. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Kekayaan Desa

Untuk meningkatkan fungsi pengawasan pengelolaan pendapatan asli desa, Desa Hangtuah memakai peran masyarakat sebagai pengawasan secara langsung yakni dengan memberdayakan masyarakat sebagai pengelola pendapatan asli desa yang terbentuk dalam tim penggerak pendapatan asli desa.

Peran masyarakat dalam pengelolaan pendapatan asli desa di Desa Hangtuah merupakan bentukan dari kepala desa dan perangkat desa sebagai tim pengelola serta pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pemerintah desa. Sistem pengawasan ini berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena adanya keterlibatan secara langsung masyarakat sebagai pengelola dan pengawas. Selain itu pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa dengan cara diatas terbukti efektif karena masyarakat dirasa lebih berperan aktif dalam keikutsertaan membangun desa melalui pengelolaan pendapatan asli desa.

d. Keterlibatan Jasa Penilai

Dalam otonomi desa pemerintah desa memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengelola kekayaan desanya, untuk itu pemerintah desa dituntut untuk dapat mengelolah kekayaan desa secara profesional. Kunci keberhasilan dari pemerintah Desa Hangtuah dinilai dari sejauh mana hasil kinerja yang telah dilakukan, maka diperlukan jasa penilai sebagai bentuk evaluasi dalam kinerja pemerintah Desa Hangtuah.

Penilaian dimaksudkan untuk memberi penilaian terhadap kinerja pemerintah Desa Hangtuah khususnya dalam mengelola pendapatan asli desa terkait administrasi dan sistem pengelolaan dilapangan. Sistem penilaian yang dilakukan adalah berupa pengadaan perlombaan desa tingkat Kabupaten Kampar, dimana desa wajib memberikan informasi melalui sistem administrasi pendapatan asli desa berdasarkan kesesuaian kekayaan yang dimiliki dengan pengelolaan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Terbukti bahwa tiap tahun dari 2012 hingga tahun 2016 Desa Hangtuah mengalami peningkatan kinerjanya dan mendapat penghargaan desa.

Kegiatan penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar berjalan sangat efektif dalam melaksanakan penilaian untuk lebih mengembangkan sistem kinerja pemerintah desa khususnya Desa Hangtuah.

e. Strategi dan Upaya Pengoptimalan Pendapatan Asli Desa di Bidang Keuangan Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Strategi dan upaya yang tepat dalam pengelolaan pendapatan asli desa mempengaruhi dalam meningkatnya pendapatan asli desa, begitu pula dengan pendapatan asli desa yang mampu memberikan sumber pemasukan secara meningkat tiap tahunnya juga dapat mempengaruhi dalam proses pembangunan desa.

Berdasarkan observasi diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan pembangunan desa secara fisik yaitu dengan adanya penambahan pembangunan 25 kios sebagai sarana perdagangan masyarakat dan perbaikan fasilitas-fasilitas umum dipasar umum desa, selain itu peningkatan pendapatan asli lainnya juga terkelolah secara efektif sehingga memberikan dampak positif terhadap kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Hangtuh.

Sejalan dengan pembangunan desa dari segi aspek fisik, pembangunan sumber daya manusia Desa Hangtuh juga mengalami peningkatan khususnya dalam pengembangan usaha ekonomi melalui pelatihan pengembangan produk lokal. Masyarakat diberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai untuk bisa mengembangkan produk-produk lokalnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Desa Hangtuh dapat membangun, memanfaatkan, dan

mengeksploitasi dengan tepat (optimal, efektif, dan efisien). Dimana segala potensi dan sumber daya yang telah dimiliki desa mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan memberikan perubahan kea arah yang lebih baik.

3.2. Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

a. Belum hilangnya paradigma bahwa pemerintah desa masih berposisi sebagai bahawahan Bupati dibanding sebagai Pemerintah Otonomi. Selama ini belum berubah atau kelar dari stereotepe yang demikian, sulit rasanya peluang desa untuk menjadi entitas sisual politik yang otonom. Karena itu perlu upaya untuk menghilangkan cara pandang pada semua aparat di Kabupaten bahwa desa merupakan struktur pemerintah terendah di bawah Kabupaten. Pandangan ini mungkin hanya relevan jika berhubungan dengan urusan birokrasi.

b. Anggapan seperti ini tidak akan mendorong terbentuknya otonomi desa. Karena Kabupaten masih menganggap dirinya berhak mengatur desa serta memandang desa masih belum mampu untuk mengelola kehidupannya secara mandiri. Ini terlihat jelas dari banyaknya urusan yang sebenarnya merupakan

intern desa, banyak diambil alih Kabupaten, sehingga tidak ada ruang bagi desa untuk melakukan pengelolaan pemerintah dalam konteks *self governing community*.

- c. Adanya gap atau tidak adanya integritas antara keinginan desa dengan keinginan Kabupaten dalam penyusunan anggaran. Desa dalam menyusun anggarannya masih harus mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Kabupaten.

Inisiatif pemberdayaan ini cukup baik sebagai sebuah inisiatif dari masyarakat, tapi tidak baik dari sisi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Karena tiap tahunnya anggaran untuk pemberdayaan aparat dan lembaga-lembaga desa selalu dianggarkan. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah belum melakukan fungsinya dengan baik.

Berikut faktor-faktor yang kemudian muncul berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan:

1. Sarana dan Prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana bahkan Alat tulis (komputer) hanya terdapat 1 unit saja sebagai pendukung Pelaksanaan tugas, pelaksanaan otonomi desa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa terutama pelayanan masyarakat.

Berikut ini adalah tabel sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Hangtuah:

Tabel 3.1
Sarana dan Prasarana
di Kantor Desa
Hangtuah

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)
1	Kendaraan Dinas (Sepeda Motor)	1
2	Komputer	4
3	Printer	4
4	Meja	9
5	Kursi	17

Sumber : Desa Hangtuah

2. Sedikitnya aset desa yang menghasilkan pendapatan sehingga desa pada umumnya kesulitan mendapatkan sumber pendapatan desa yang memadai, sehingga pelaksanaan pembangunan desa sangat lamban. Karena selama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baru bisa dibuat oleh desa setelah adanya penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ditingkat Kabupaten.

Hasil penelitian, alokasi anggaran untuk desa masih belum proposional. Paling banyak alokasi anggaran yang diberikan kepada desa, tidak sampai 4 % (persen) dari total DAU yang diterima oleh kabupaten. Padahal idealnya adalah 10% dari total DAU untuk tiap-tiap desa.

Selain itu, dalam kaitannya dengan keuangan, masalah pengaturan pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada di tingkat desa. Misalnya, pasar Kabupaten yang ada ditingkat desa. Status pasar yang ada di

desa, yang sebenarnya secara ekonomi bisa dipergunakan oleh desa untuk peningkatan pendapatan desa, kurang memberi kontribusi bagi desa, disebabkan karena di kelola Kabupaten di satu sisi Kabupaten masih menganggap pasar tersebut merupakan sumber untuk menunjang PAD (pendapatan asli desa).

3. Rendahnya gaji/honor perangkat desa sehingga mengakibatkan juga rendahnya etos kerja para perangkat desa, termasuk gaji Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga pada akhirnya akan sangat mengganggu optimalnya pelaksanaan otonomi desa.

Tabel 3.2. Gaji / Honor Perangkat Desa di Desa Hangtuah

No	Jabatan	Jumlah Gaji/Honor
1	Kepala Desa	1.500.000
2	Ketua BPD	600.000
3	Sekretaris Desa	1.200.000
4	Kepala Urusan	500.000
5	Kepala Dusun	400.000
6	Ketua RT/RW	200.000

Sumber : Kantor Deda Hangtuah tahu 2016

Rendahnya sumber daya manusia di desa yang sebagian besar keterampilannya rendah, termasuk yang terlihat dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Rendahnya kelembagaan desa, lemahnya perencanaan dan kurangnya sarana dan prasarana desa, hal ini dikarenakan kurangnya masyarakat

desa yang mengenyam pendidikan dan kurangnya tingkat solidaritas masyarakat dalam memahami betapa pentingnya pendidikan.

Untuk itu kedepannya desa harus mampu mengatasi kekurangan tersebut dengan cara perencanaan yang strategis dan berkesinambungan dan dengan memberikan pelatihan serta pengkaderan bagi penduduk desa untuk bisa mengembangkan ekonomi desa.

Tabel 3.3. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa di Desa Hangtuah

No	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN
1	Kepala Desa	Strata (S1)
2	Ketua BPD	SMA
3	Sekretaris Desa	SMA
4	Kepala Urusan	SMP
5	Kepala Dusun	SD

Sumber : Kantor Desa Hangtuah

Penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan pengaturan desa, pada umumnya masih mengadopsi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten cenderung menjadikan kebijakan Pemerintah tersebut sebagai satu-satunya pedoman umum dalam menyusun pengaturan tentang desa, akibatnya berbagai Peraturan Daerah (PERDA) yang dilahirkan terkesan kurang mencerminkan kondisi dan kebutuhan desa yang sebenarnya.

Di samping itu keterlibatan unsur desa dalam penyusunan kebijakan utamanya dalam merumuskan format ideal otonomi desa dirasakan masih sangat kurang

bahkan hampir tidak ada, akibatnya kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah dianggap tidak aplikatif karena hanya merespon peraturan Perundang-undangan yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi desa sangat dipengaruhi oleh kinerja Pemerintah Desa dalam hal ini pemerintahan desa di Desa Hangtuah belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa belum ditunjang dengan pendanaan dan fasilitas yang memadai. Selama ini tunjangan penghasilan yang diterima oleh Desa/perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dirasakan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan beban tugas dan tanggung jawab yang harus mereka jalankan. Disamping itu fasilitas penunjang yang ada juga masih sangat kurang. Kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja, utamanya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. Kurangnya pemahaman terhadap pokok. Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten telah melakukan serangkaian pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Minimnya pemahaman terhadap tugas pokok menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seringkali bertindak melampaui batas kewenangan yang dimilikinya.
3. Pelaksanaan tugas pemerintahan yang tidak

seimbang, selama ini pemerintah desa lebih banyak menjalankan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintah ditingkat atasnya, sementara tugas-tugas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat cenderung kurang diperhatikan.

4. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa juga disebabkan karena PERDA yang belum mengatur secara jelas batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh desa sehingga desa tidak pegangan yang kuat dalam menjalankan kewenangan.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Upaya Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar adalah dengan lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Desa khususnya dalam pelaksanaan pembangunan maka perlu ditingkatkan lagi kemampuan aparat desa dalam hal manajemen, pendidikan, baik itu pelatihan bagi kader desa sehingga potensi yang belum dikelola dapat dimanfaatkan demi kepentingan kesejahteraan desa. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Hangtuah adalah Faktor Sarana dan Prasarana, Sedikitnya aset desa yang menghasilkan pendapatan Desa, Rendahnya gaji/honor perangkat desa

b. Saran

Berdasarkan hasil yang ditemukan didalam penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran yakni :

1. Kerja sama antara Desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara umum harus lebih ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan otonomi desa yang dilandasi dengan ciri khas sehingga terwujud otonomi desa.
2. Saling koordinasi dalam hal pengawasan pelaksanaan Peraturan desa antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala desa sesuatu hal yang penting agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara masing-masing pihak.
3. Sebagai suatu lembaga yang tugasnya adalah melakukan pengawasan maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bertindak tegas kalau dalam pengawasan tersebut terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan desa misalnya langsung mengkonfirmasi hal tersebut dengan Kepala Desa.
4. Untuk meningkatkan etos kerja bagi perangkat desa hendaknya Pemerintah Daerah dapat menaikkan gaji/honor perangkat desa mengingat aset desa sangat minim.
5. Segera diterbitkan Peraturan Kabupaten tentang penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten yang perlu diserahkan kepada desa, agar menjadi pedoman yang jelas bagi desa untuk mengimplementasikan kewenangan tersebut.
6. Diperlukan kebijakan Pemerintah Kabupaten

maupun Lembaga Profesional seperti Perguruan Tinggi untuk:

- a. Meningkatkan profesionalitas perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar mampu menjalankan fungsi masing-masing, dan mampu mengelola sumber pendapatan desa secara profesioanal,
- b. Memberikan keleluasaan kepada Kepala Desa untuk mengembangkan kreatifitas dan inisiatif dalam menjalankan otonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman (editor), 1987. *Beberapa Pemiiran Tentang Otonomi Desa*. Jakarta : Media Sarana Press.
- Ari Dwipayana. 2001. *Promosi Otonomi Desa*. Yogyakarta. IRE Press.
- Colin MacAndrews. 1993. *Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Dann Sugandha. 1981. *Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : CV. Sinar Baru.
- Djoko Sudantoko. 2013. *Dilema Otonomi Daerah*. Jakarta : ANDI.

- Julmansyah dan Moh.Taqiuddin. 2003. *Partisipasi dan Penguatan Desa :Obsesi atau ilusi*. Mataram : Pustaka Konsepsi Nusa.
- HAW. Widjaja.2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Husaini Usaman dan Purnomo. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial, cet. Ke-2*.Jakarta : Bumi Akasara.
- Budiarjo, Miriam. 1988. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Moleong, j Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosydakarya.
- Raharjo.2006. *Membangun Desa Patisipatif*.Graha Ilmu : Yogyakarta
- Sadu Wasistiono. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : CV. Fokus Media
- Sadu Wasistiono. 2001. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*.Jakarta : Alqapriat Jatinangor
- Setyawan Salam. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Jakarta : Djambatan
- Taliziduhu Ndraha. 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa,cet.ke-3*.Jakarta : Bumi Aksara
- Mardiasmo. 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- , 2003. Laporan Akhir Studi Desentralisasi Fiskal Desa di Kabupaten Sumbawa : Kaji Terap Dana Perimbangan Kabupaten Desa. Bappeda dan Pusat Studi Pengembangan Regional (PSPR) UNSA – Sumbawa Besar.
- , 2004.Himpunan Lembaran Daerah Mengenai Pemerintah Desa Tahun 2001, Bagian Hukum Setda Kab. Sumbawa TA 2004
- Sumber Lain**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.
- Skripsi Terdahulu Sandi Handayani 0901120214(Faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Desa)
- Referensi Internet**
- Hayuna,Rizka.2012.*Manajemen Aset BUMDES dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik)*. Surabaya e-journal publika Universitas Negeri Surabaya.
- Amanda, Helmei Willy.2012.*Strategi Pembangunan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melaui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)*. Surabaya: e-journal public Universitas Negeri Surabaya.